

BAB VI

Kesimpulan dan Saran

6.1 KESIMPULAN

Kerjasama ekonomi dalam lingkup bilateral merupakan salah satu bentuk kerjasama yang mungkin dinilai baik untuk dilakukan oleh beberapa pihak, mengingat keuntungan yang didapatkan cenderung terasa lebih cepat karna aktor pada kerjasama hanya terdiri dari 2 pihak. Kerjasama bilateral sering dijadikan wadah untuk meningkatkan kepentingan nasional yang dimiliki oleh masing-masing negara tanpa harus membuat sebuah keputusan yang harus disetujui oleh konsesus dr beberapa negara, Indonesia mengetahui hal tersebut dan memiliki kepentingan utama yaitu dengan mencapai swasembada pangan agar harga daging sapi yang bersifat komoditas menjadi stabil. Australia dengan program kerja donor aid yang diperuntukan oleh negara berkembang merupakan kesempatan yang baik bagi Indonesia untuk menyampaikan apa yang sedang dibutuhkan oleh Indonesia, hal ini juga merupakan kabar baik bagi Australia karna adanya program kerja yang diusulkan dari negara penerima donor yang memiliki relevansi tinggi terhadap pembangunan negaranya. Sesuai dengan teori kerjasama bilateral yang dilakukan oleh kedua negara, poin utama menurut (Boediono, 1981) yang membuat kerjasama ekonomi terus berjalan ialah tentang bagaimana kedua pihak dapat menemukan regulasi yang memungkinkan untuk kedua belah pihak mendapatkan keuntungan, hal tersebut berhubungan langsung dengan proses kesetaraan yang didapatkan oleh kedua pihak yang meliputi, sumberdaya alam, manusia teknologi hingga potensi jumlah investasi di masa yang akan datang. dengan adanya pengajuan bahwa Indonesia membutuhkan program yang memiliki fokus terhadap produk daging sapi dalam negeri diajukan, namun kinerja dari kerjasama ini tidak memiliki hasil yang maksimal dikarnakan masih tergolong luas , oleh karna itu setelah 3 tahun berjalan Indonesia merasa perlu memfokuskan program *Red Meat Cattle Partnership* untuk memberikan hasil pada tujuan awal kementerian pertanian dengan meningkatkan populasi daging

sapi potong yang ada di Indonesia, beberapa pertemuan dijalankan yang pada akhirnya pada tahun 2016 IACCB atau Indonesia Australia Commercial Cattle Breeding Program diinisiasikan dengan harapan dapat mengatasi dan menstimulasi pertumbuhan populasi daging sapi di Indonesia. Setelah 3 tahun berjalan justru program IACCB yang notabene nya menjadi program naungan dari *Red Meat & Cattle Partnership* terbukti memiliki hasil yang baik dengan berhasil meningkatkan populasi sapi potong yang ada pada beberapa mitra yang tersebar di beberapa daerah Indonesia yang memiliki potensi atas uji coba dari metode komersialisasi ternak yang dilakukan oleh IACCB. Beberapa hal yang membuat IACCB dinilai lebih berhasil karna hanya melakukan koordinasi dengan para peternak dan koordinasi bersifat informal dan teknis aktor kerjasama IACCB juga merupakan dari institusi langsung kepada pelaku usaha yang menginginkan proyek uji coba metode pembiakan yang akan didukung oleh program IACCB dengan berbagai metode bantuan dari mulai fiskal hingga non fiskal. Sementara *Red Meat & Cattle Partnership* memiliki kerumitan dimana aktor nya merupakan representatif yang mewakili kepentingan nasional dari setiap negara dan memerhatikan potensi dan kekurangan dari diri sendiri dan mitra kerjanya, meskipun karna telah terjadi nya kerjasama membuktikan kedua negara telah mengesampingkan rasa curiga nya atas satu sama lain dan sepakat untuk melakukan kerjasama ekonomi secara bilateral, namun adanya kepentingan nasional ada adanya hambatan yang dialami saat proses birokrasi yang memperlambat proses kemajuan dari program karna minimnya koordinasi antar instansi pemerintah dari kedua negara

Hal ini ditemukan dari beberapa laporan yang dikeluarkan oleh laman kerjasama yang selalu menunjukkan level koordinasi antara kedua instansi pemerintahan terkait tidak berjalan dengan lancar dan terkadang ketika kedua pihak bertemu pada kegiatan konsolidasi, para ahli dibidang nya maupun para pemegang kebijakan tidak dapat hadir pada kegiatan konsolidasi yang menyebabkan regulasi dan ketetapan tidak dapat dirumuskan dengan segera. Hal ini juga mempengaruhi pada relevansi dan dampak yang dirasakan oleh para pelaku industri dan beberapa sektor pemerintahan yang merasa bahwa jika kerjasama ini tidak lagi dilakukan maka

dampak yang dirasakan adalah minimal hingga tidak adanya perubahan, namun hal yang pasti dirasakan ketika kerjasama ini berakhir ialah (Red Meat & Cattle Partnership, 2019):

1. Indonesia tidak akan lagi menerima keuntungan berupa pelatihan kapasitas, investasi dan pendanaan pada sektor industri daging sapi
2. Proyeksi investasi terdahulu tidak akan mencapai tingkat maksimal
3. Australia akan kehilangan kesempatan untuk mendapatkan pasar dalam negeri Indonesia dan fungsi pemasaran dari kerjasama ini akan berhenti
4. Hubungan bilateral dan komunikasi intra instansi kedua negara akan mengalami kemunduran

Beberapa akibat yang dihasilkan dari pemberhentian kerjasama ini sangat dirasakan bagi kedua pemerintahan terutama pada tujuan dan pencapaian dalam negeri, dan lagi dengan telah diratifikasinya program kerjasama IA-CEPA membuat potensi yang dimiliki oleh kedua negara dalam bidang perdagangan dan investasi pada produk daging sapi semakin terbuka karena adanya pembebasan tariff dan pembukaan investasi dengan perlakuan khusus.

Penelitian ini bertujuan untuk meneliti terkait dampak yang dihasilkan oleh kerjasama Indonesia dan Australia dalam Skema *Red Meat & Cattle Partnership* dalam sisi kinerja perdagangan dan kinerja produksi daging sapi yang menjadi tujuan utama dari program ini, namun penelitian ini berfokus pada motif kedua negara dalam melakukan kerjasama, mengetahui bahwa suatu kerjasama hanya akan berjalan jika memenuhi beberapa syarat tertentu dan penelitian ini yang menggunakan teori kerjasama ekonomi secara bilateral dan dipandang pada pemahaman realis maka seluruh kerjasama dilakukan seutuhnya untuk pencapaian kepentingan nasional. Kerjasama ini juga menjadi wadah bagi pendekatan komunikasi dua negara agar dapat mengetahui kondisi yang ada pada masing-masing negara dan secara tidak langsung memengaruhi preferensi kebijakan yang sedang maupun akan diregulasikan dengan pemahaman *politics of reciprocity* yang menyebutkan bahwa hanya dengan pengembalian apresiasi maka kerjasama dapat terus dijalankan. Masa depan industri

daging sapi Indonesia nyatanya tetap pada usaha dan keringat peternak yang akan tetap menjadi tumpuan bagi ketahanan pangan Indonesia , namun dengan adanya kerjasama ini dapat menjadi stimulant dan akselerasi bagi industri agar dapat merestrukturisasi peternak menjadi peternak komersial dan memaksimalkan potensi yang dimiliki Indonesia tanpa harus bergantung pada program bantuan donor dari negara lain.

6.2 SARAN

Penulis berusaha mengetahui apa yang menjadi hambatan Indonesia pada kerjasamanya dengan Australia karna data menunjukkan tingkat produksi dalam negeri pada daging sapi mengalami tingkat yang fluktuatif , meskipun tren keseluruhan mendapatkan tren positif namun tidak ada perubahan berarti pada produksi daging sapi setelah adanya kerjasama ini jika dibandingkan pada beberapa tahun sebelumnya, mengingat pentingnya data produksi dalam parameter keberhasilan program kerjasama ini, setelah datangnya program yang bernama IACCB yang memfokuskan pada pembiakan yang menunjukkan hasil positif bagi para peternak agar dapat meningkatkan populasi hewan ternaknya, namun ada beberapa kendala yang dialami oleh proses *transfer knowledge* yang dilakukan yaitu antara lain disebabkan oleh rendahnya sumber daya manusia dalam bidang pendidikan dasar, hal ini berpengaruh pada ketidakmampuan SDM Indonesia atau peternak mendapatkan ilmu yang bersifat kompleks guna meningkatkan kualitas industri ternak yang ada. Secara praktis penulis memberikan saran kepada pemerintah untuk mengadakan beberapa program insentif bagi peternak muda yang memiliki latar belakang pendidikan sesuai dengan kegiatan wajib belajar yang ditetapkan pemerintah, insentif ini akan berdampak dengan generasi muda yang mungkin melakukan ruralisasi karna adanya kesempatan bekerja yang baik dengan beternak, mengingat peternakan memiliki demografi usia yang cukup menua, selain mengadakan insentif mungkin kedua instansi pemerintahan memperbaiki birokrasi koordinasi yang dirasa menjadi penghambat efisiensi, karna sebagian besar hambatan yang dialami oleh kerjasama ini adalah minimnya koordinasi dan ketidakhadiran aktor penting pada pertemuan yang memiliki relevansi tinggi.

Secara akademis, penulis berharap adanya riset lanjutan mengenai politik sumberdaya pangan pada wilayah yang memiliki ketimpangan terhadap pasokan persediaan dan kemampuan produksi, hal ini agar dapat menjadi bahan komparasi bagi penelitian selanjutnya, dan bagi akademis yang ingin melanjutkan mengenai kerjasama *Red Meat & Cattle Partnership* di fase ke 2 atau perkembangan hubungan diplomatis, kinerja ekspor impor hingga perkembangan industri peternakan sapi di Indonesia paska penyelesaian masa kerjasama juga merupakan salah satu pertanyaan yang masih belum dapat terjawab oleh penulis dikarenakan jangka waktu kerjasama hingga kondisi dan data yang belum tersedia. Diharapkan Indonesia dapat memenuhi kebutuhan pangan dalam negeri pada jangka waktu dekat dan menjadi eksportir komoditas daging sapi pada jangka waktu panjang karna potensi yang dimiliki Indonesia sangatlah tinggi.